Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp
Volume 8 Nomor 1, 2025
P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/01/2025
Reviewed : 02/02/2025
Accepted : 02/02/2025
Published : 26/02/2025

Bernadetha Evarista[1]
Emilianus Eko Kutu Goo[2]
Nunsio Handrian Meylano[3]

PERAN BAPPERIDA DALAM MENDORONG PENERAPAN LAYANAN PAUD HOLISTIK INTEGRATIF DI KABUPATEN SIKKA

Abstrak

Pendidikan merupakan salah satu sektor yang sangat penting dan juga memiliki peran fundamental sebagai dasar pembangunan suatu negara. Pendidikan berfungsi sebagai alat utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Penerapan program Paud Holistik Integratif di Kabupaten Sikka memiliki peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas sejak dini. BAPPERIDA, sebagai instansi yang memiliki tanggung jawab dalam peningkatan kualitas pendidikan, berperan sebagai koordinator dalam penyelenggaraan layanan ini. Melalui Tim Gugus Tugas yang dibentuk bersama beberapa instansi terkait, BAPPERIDA memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari penyusunan dasar hukum hingga sosialisasi kepada lembaga PAUD, berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Abstrak: BAPPERIDA; Penerapan; Paud Holistik

Abstract

Education is one of the most important sectors and plays a fundamental role as the foundation for a country's development. It serves as the primary tool for creating high-quality human resources. Data collection techniques are methods used to obtain data and information related to research. The implementation of the Holistic Integrative Early Childhood Education (PAUD) program in Sikka Regency plays a crucial role in developing high-quality human resources from an early age. BAPPERIDA, as the institution responsible for improving the quality of education, acts as the coordinator in organizing this service. Through the Task Force Team formed in collaboration with several related institutions, BAPPERIDA ensures that the entire process, from establishing the legal basis to disseminating information to PAUD institutions, runs smoothly and in accordance with applicable regulations.

Abstract: BAPPERIDA; Implementation; Holistic Integrative Early Childhood Education (PAUD)

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sektor yang sangat penting dan juga memiliki peran fundamental sebagai dasar pembangunan suatu negara. Pendidikan berfungsi sebagai alat utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Di Indonesia sistem pendidikan memuat beragam jenjang, dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Pemerintah telah menetapkan Undang – Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan betapa pentingnya pendidikan bagi semua warga Indonesia (Sistem Pendidikan Nasional, 2003). Pemerintah juga telah melakukan banyak upaya untuk mendorong system pendidikan di Indonesia agar lebih maju.

Namun pesatnya perkembangan teknologi saat ini, dimana terjadi transformasi signifikan di berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, budaya, dan dunia kerja mendorong pemerintah, sektor industri, dan perusahaan untuk beradaptasi dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan baru. Perubahan ini juga berdampak besar pada dunia pendidikan, yang dituntut untuk menghasilkan sumber daya manusia yang siap bersaing dalam lingkungan yang semakin kompleks dan dinamis.

[1,2,3)] Universitas Nusa Nipa
email: bernadethevirsta@gmail.com[1]

Menghadapi tuntutan ini Kementrian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendibudristek) melakukan salah satu upaya yaitu meluncurkan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Program ini di atur dan di keluarkan oleh menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Program ini sendiri bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih fleksibel dan relevan dengan kebutuhan zaman juga mampu meningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif, mulai dari Pendidikan dasar hingga perguruan tinggi (Kemendikbud, 2021).

Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di perguruan tinggi merupakan langkah penting untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tuntutan dunia kerja di era Industri 4.0. Melalui fleksibilitas kurikulum, peningkatan keterampilan praktis, dan kolaborasi dengan dunia industri, MBKM berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja, serta menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan adaptasi, kreativitas, dan kewirausahaan yang tinggi. Dengan demikian, MBKM menjadi program yang sangat relevan dan strategis dalam meningkatkan daya saing mahasiswa dan pendidikan tinggi Indonesia di tingkat global.

Terdapat beberapa program Merdeka Belajar, salah satunya yaitu kegiatan magang atau praktik kerja yang bersertifkat pada industri maupun tempat kerja yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Magang dalam kerangka Merdeka Belajar bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara pendidikan dan industri, mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi tenaga kerja yang lebih siap, adaptif, dan berdaya saing tinggi di pasar kerja. Program ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar tidak hanya sekadar teori tetapi juga bisa mengembangkan keterampilan langsung pada dunia kerja, dengan kebutuhan industri, seperti soft skills kerjasama tim, komunikasi, problem solving dan hard skills.

Banyak perguruan tinggi di Indonesia yang telah menerapkan program Merdeka Belajar bersertifikat bagi mahasiswa, salah satunya adalah Perguruan tinggi Universitas Nusa Nipa Indonesia. Bekerja sama dengan beberapa badan Lembaga yang ada di Kabupaten Sikka, untuk menjadi tempat pelaksanaan magang atau praktik kerja bagi mahasiswa. Salah satunya dan merupakan tempat dimana penulis diposisikan yaitu kantor Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah.

Badan Perencanaa Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) atau yang sebelumnya dikenal dengan BAPPELITBANG merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah, untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah. BAPPERIDA sendiri terbagi kedalam beberapa bidang yang dimana setiap bidang mempunyai tugas dan fungsinya masing – masing. Dan dalam pelaksanakan program magang ini penulis di tempatkan pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM).

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia di pimpin oleh seorang kepala bidang dan bidang ini bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan perencanaan di bidang pemerintahan, Pendidikan dan kebudayaan dan kesejahteraan sosial, yang meliputi urusan kepegawaian dan Pendidikan dan pelatihan, Sekretariat Daerah, sekretarian dewan perwakilan rakyat daerah, pemberdayaan masyarakat daerah, inspektorat, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pemadam kebakaran, kesatuan bangsa politik, penanggulangan bencana, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Meskipun Indonesia semakin maju dengan berbagai macam teknologi yang hadir namun tetap terdapat ketertinggalan di beberapa daerah terpencil. Penyebab ketidakmerataan ini adalah kondisi geografis dimana beberapa daerah berada di pelosok yang sulit untuk dijangkau dan beberapa aspek lainnya. Namun pemerintah terus berupaya melakukan program agar mencapai kualitas pendidikan yang merata bagi masyarakat.

Pendidikan di Kabupaten Sikka juga sama halnya seperti di daerah lainnya, terus mengalami perkembangan meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Akses Pendidikan di daerah ini semakin baik dengan adanya pembangunan infrastruktur di berbagai kecamatan

dan desa, namun masih terdapat ketidakmeratan akibat beberapa daerah sulit dijangkau. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah.

Selain tantangan geografis atau tata letak, kualitas pendidikan di Daerah Kabupaten sikka juga di pengaruhi oleh beberapa hal, seperti keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi tenaga pengajar juga fasilitas pendidikan, kesulitan untuk menjangkau sekolah, baik karena jarak yang jauh maupun karena keterbatasan alat transportasi, juga kurangnya partisipasi dari orangtua dan masyarakat. Beberapa langkah yang bisa diambil adalah seperti memberikan pelatihan kepada tenaga pendidik, mengusahakan faslitas yang cukup untuk mendukung proses belajar juga beberapa hal lainnya.

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu pembinaan yang ditujukan kepada anak dari sejak lahir sampai dengan usia enam tahun (6 tahun) yang dilakukan melalui rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, Ambariani & Suryana, (2022). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki manfaat yang sangat signifikan dalam perkembangan anak. Di usia dini, anak-anak sedang dalam fase kritis untuk belajar dan beradaptasi. Paud memberikan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan kognitif melalui interaksi dengan teman sebaya dan pengajaran yang terstruktur. Dengan berbagai aktivitas permainan dan pembelajaran yang menyenangkan, anak dapat meningkatkan kreativitas serta kemampuan berpikirnya, yang merupakan fondasi penting untuk pendidikan selanjutnya.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah investasi jangka panjang yang penting dalam mempersiapkan anak-anak untuk kehidupan mereka di masa depan. Dengan pendekatan yang tepat, PAUD dapat membantu anak-anak mengembangkan potensi terbaik mereka dan mencapai perkembangan fisik, kognitif, serta emosional yang optimal, yang akan mendasari kesuksesan mereka di pendidikan dasar dan seterusnya.

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang kebijakan pemerintah untuk mengembangkan anak usia dini secara holistik-integratif. Perpres ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menjamin hak tumbuh kembang anak usia dini yaitu pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan. Paud HI dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan. Program ini bertujuan untuk mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter. (Kemendikbud, 2015).

Holistik mengandung arti bahwa penanganan anak usia dini secara utuh (menyeluruh) yang mencakup layanan berupa pemberian gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, serta perlindungan, untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak usia dini. Sedangkan Integratif/Terpadu artinya adalah penanganan anak usia dini dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, pemerintah daerah, serta pusat.

Untuk mendukung perkembangan kualitas pendidikan yang baik, salah satu program yang di jalankan oleh pemerintah kabupaten Sikka adalah penerapan layanan Paud HI. Penerapan layanan Paud HI diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten sikka Nomor 17 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perkembangan anak usia dini holistik integratif. Pada pasal 2 tentang tujuan dan perinsip bahwa tujuan umum Paud HI adalah terselenggaranya layanan paud HI menuju terwujudnya sumber daya anak daerah yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia sesuai dengan tahap perkembangan dan usianya (Daerah & Sikka, 2016).

Paud HI bertujuan untuk menyediakan layanan pendidikan anak usia dini yang terkoordinasi dan menyeluruh dan tidak hanya fokus pada akademis tetapi juga dapat mencakup perkembangan fisik dan emosional, sosial dan psikologis anak. Penerapan layanan paud HI ini sangat penting karena merupakan salah satu upaya pemerintah menciptakan dasar pendidikan yang berkualitas.

METODE

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam laporan ini adalah sebagai berikut :

Menurut Sugiyono dalam Sahbuki Ritonga (2023), menyatakan bahwa “Wawancara digunakan sebagai teknik pengunpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta juga apabila peneliti ingin mengetahui hal – hal dari responden yang lebih mendalam". Sedangkan menurut Moleong dalam Nasional et al., (2019), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau disebut interviewer yang mengajukan pertanyaan dan yang terwawancara atau disebut interviewee yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan.

Proses wawancara tidak hanya pada interaksi tanya jawab, tetapi juga melibatkan observasi terhadap respons verbal maupun nonverbal dari narasumber, seperti intonasi, ekpresi wajah, dan bahasa tubuh. Moleang menenkankan bahwa wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat penting, terutama dalam peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, atau opini narasumber terkait suatu fenomena. Dalam konteks penelitian, wawancara biasanya dirancang untuk mengumpulkan data yang tidak dapat diperoleh melalui motedo lain, seperti survei atau observasi, sehingga hasil wawancara memiliki nilai yang signifikan untuk mendukung analisis dan kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan magang dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangungan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka, khususnya di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM). Kegiatan magang dilakukan dalam kurun waktu lebih tiga bulan, dimulai tanggal 2 september 2024 sampai 12 Desember 2024. Dalam kurun waktu kurang lebih tiga bulan banyak kegiatan yang dilakukan yaitu:

1. Mengikuti Rapat Penyerahan dan Penerimaan juga pelantikan PLT BAPPERIDA
2. Mengidentifikasi kesesuaian data P3KE
3. Mengelola data balikan dari hasil identifikasi data verval dan database
4. Mengikuti rapat terkait ATM di Kantor Bupati Sikka
5. Mengikuti kegiatan kemitraan lintas sektor, CSR dan Dana Desa yang di adakan oleh ADINKES
6. Mengikuti rapat Koordinasi Evaluasi Penyusunan Dokumen BLUD Puskesmas & Labkesda
7. Mengikuti rapat Evaluasi Perkembangan Puskesmas & Labkesda Sikka menuju BLUD 2024
8. Membuat notulen rapat
9. Mengikuti rapat Satgas Integrasi Layanan Primer Kesehatan Kab. Sikka di Aula BAPPERIDA
10. Mengikuti rapat penyusunan Dokumen Renstra
11. Mengikuti rapat Koordinasi & Evaluasi Rencana Aksi Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini dan Holistik Integratif
12. Mengikuti rapat Koordinasi Pembahasan Ranperbub tentang Renstra, Pola Tata Kelola dan SPM dalam rangka penerapan BLUD Puskesmas & Labkesda
13. Mengikuti pelaksanaan monitoring layanan ILP
14. Mengikuti pelaksanaan assessment Paud HI ke beberapa Lembaga Paud
15. Mengisi SPT dan SPPD perjalanan Dinas
16. Mengikuti rapat pembahasan Ranperbub Percepatan Penurunan Stanting dan Penanggulangan Kemiskinan
17. Mengikuti rapat koordinasi Integrasi KSS ke JKN
18. Mengikuti Rapat Aksi Ranham
19. Mengikuti Sosialisasi tentang kekerasan terhadap anak sebagai bagian dari penerapan layanan Paud HI
20. Mengikuti rapat koordinasi tindak lanjut Integrasi KSS ke JKN bagi PPNPN dan PPPK
21. Mengikuti rapat Desk percepatan Data Pensasaran Penghapusan kemiskinan extrem

Pembahasan

Dalam pelaksanaan pembangunan Daerah, tidak terlepas dari peran serta pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama serta konsistensi dalam melaksanakan program kegiatan yang telah dirumuskan menjadi kunci utama dalam mencapai pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Salah satu cara yang menjadi bagian dari pembangunan daerah adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan sehingga menghasilkan SDM yang mampu membangun daerah menjadi lebih baik

1. Peran Bapperida Terhadap Proses Pengadaan Paud Holistik Integratif

Paud Holistik Integratif adalah salah satu program yang berkaitan dengan pedidikan anak usia dini. Pentingnya program ini adalah menjadi dasar pembentukan SDM yang berkualitas kejenjang berikutnya untuk Pembangunan Kabupaten Sikka. BAPPERIDA merupakan salah satu instansi yang berperan penting dalam peningkatan kualitas pendidikan di kabupaten Sikka. Pada program penerapan layanan Paud Holistik Integratif ini , lebih terkhusus ditangani oleh bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia (PPM).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat Fungsional pada Bidang PPM, menyatakan bahwa : peran BAPPERIDA dalam proses penyelenggaran kebijakan ini adalah sebagai Koordinator dan sekaligus sekretariat pelaksanaan penerapan layanan ini. Bersama Dinas dan beberapa instansi Bapperida terbentuk kedalam Tim Gugus Tugas.

Proses penerapan layanan Paud Holistik Integratif :

1. Tim Gugus tugas melakukan Penyelarasan dasar hukum yang mengacu pada Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Paud HI, yang kemudian diterjemahkan ke dalam Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2017.
2. BAPPERIDA mengusulkan draf Peraturan Bupati (Perbub) sebagai tindak lanjut implementasi kebijakan tersebut. Peraturan Daerah ini kemudian diadaptasi ke dalam Peraturan Bupati yang berfungsi sebagai petunjuk teknis dan langkah-langkah operasional untuk mendukung kebijakan Paud HI.
3. BAPPERIDA bersama dengan Badan Legislasi Daerah dan para pemangku kepentingan terkait, dalam Focus Discussion Group (FDG), melakukan pembahasan hingga publikasi Peraturan Bupati untuk menjadi dasar hukum yang sah bagi penyelenggaraan layanan ini.
4. Setelah dasar hukum tersedia, Tim Gugus Tugas selanjutnya melakukan sosialisasi kepada Lembaga Paud, khususnya bagi Paud yang telah terakreditasi minimal dengan predikat B, agar seluruh pihak terkait dapat memahami dan mengimplementasikan layanan ini.

2. Peran Bapprida sebagai Koordinasi terhadap Instansi Penyedia Layanan

Lembaga yang belum menerapkan layanan Paud HI terkendala oleh beberapa hal yang menjadi indikator penilaian belum tersedia. Berkaitan dengan hal ini BAPPERIDA turut mengambil bagian dalam penyediaan layanan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat Fungsional pada Bidang PPM, menyatakan bahwa : sebelum berkoordinasi dengan Instansi atau dinas penyedia layanan, BAPPERIDA terkhusus bidang PPM terlebih dahulu turun langsung menuju Lembaga yang menjadi sasaran untuk melakukan assessment dengan menggunakan beberapa indikator sebagai instrument penilaian dan dibuat dalam bentuk tabel yang disediakan. Lalu kemudian hasil penilaian akan menjadi dasar penetapan tingkatan PAUD HI oleh Pemerintah Daerah. Untuk beberapa layanan yang belum diperoleh, BAPPERIDA akan berkoordinasi dengan Dinas atau Instansi terkait untuk memberikan layanan kepada lembaga yang bersangkutan, namun sebelumnya akan diberikan sosialisasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan layanan. Setelah tergolong tingkatan mandiri Pemerintah Daerah memberikan sertifikasi terhadap penyelenggara PAUD HI berdasarkan penilaian atas pelaksanaan pemenuhan standar layanan pada Satuan PAUD. Terakhir BAPPERIDA bersama tim juga akan memastikan bahwa layanan ini terus berjalan dengan baik setiap tahunnya.

Instansi atau Dinas Penyedia Layanan Berdasarkan peraturan daerah kabupaten Sikka nomor 17 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif Pasal 11 :

1. Layanan pendidikan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
2. Layanan kesehatan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
3. Layanan sosial, secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
4. Layanan pengasuhan, secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Layanan penyuluhan, secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Layanan fasilitasi secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
7. Layanan perlindungan secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

3. Peran serta Pemerintah Desa/Kelurahan Dalam Paud Holistik Integratif

Dalam penerapan Paud Holistik Integratif Pemerintah Desa/ Kelurahan ikut terlibat menyelenggarakan layanan ini. Perangkat Desa/Kelurahan berperan sangat penting karena mereka berada di garis depan dalam menyediakan akses dan dukungan langsung kepada masyarakat desa. Sebagai pengelola wilayah terkecil, pemerintah desa dapat memastikan bahwa anak-anak di desanya mendapatkan akses yang merata terhadap layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang berkualitas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat Fungsional pada Bidang PPM, menyatakan bahwa : Pemerintah Desa/Kelurahan wajib terlibat dan berperan aktif dalam penyelengaraan ini. Beberapa hal yang perlu Pemerintah Desa/Kelurahan lakukan adalah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, mengalokasikan anggaran melalui kebijakan alokasi dana desa/dana bantuan pembangunan kelurahan, lalu kemudian bekerjasama dengan mitra pendukung, dan menyediakan sarana dan prasarana pendukung, menyebarluaskan informasi serta melakukan advokasi.

Peran serta pemerintah Desa/Kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 17 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif :

1. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah
   a) pengurusan ijin operasional pendirian PAUD HI oleh masyarakat
   b) menentukan kebijakan anggaraan PAUD HI melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/ Anggaran Kelurahan
   c) penguatan kapasitas tutor dan kader
   d) pengembangan layanan PAUD HI
2. Alokasi anggaran
   a) transport tutor, kader posyandu, dan kader BKB
   b) operasional PAUD HI
   c) sarana dan prasarana
   d) penguatan kapasitas tutor dan kader.
3. Kerjasama mitra pendukung
   a) penguatan kapasitas tutor dan kader
   b) penyediaan sarana dan prasarana
   c) penyediaan media pendukung dan sarana bermain.
4. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung
   a) menyediakan lahan PAUD HI
   b) membangun gedung
   c) menyediakan sarana bermain
   d) media pendukung.
5. Penyebarluasan infomasi
   a) sosialisasi
   b) menyediakan media informasi
6. Advokasi
   a) melakukan supervisi
   b) pertemuan secara berkala dengan pengelola PAUD HI
   c) menyelesaikan masalah dalam penyelenggaraan PAUD HI.

4. Kendala yang Dihadapi dan Kebijakan yang Dilakukan BAPPERIDA

Dalam pelaksanaan penerapan layanan ini, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi oleh BAPPERIDA, baik yang berasal dari Tim Gugus Tugas maupun dari lembaga PAUD itu sendiri. Meskipun demikian, Tim Gugus Tugas senantiasa berupaya keras untuk memastikan bahwa layanan ini dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan merata, dengan mengatasi berbagai tantangan yang muncul, termasuk keterbatasan sumber daya, koordinasi antar instansi, serta kesiapan lembaga PAUD dalam mengadaptasi sistem yang diterapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat Fungsional pada Bidang PPM, menyatakan bahwa : ada beberapa kendala yang dihadapi selama proses penerapan, salah satunya yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terlibat sebagai penyedia standar layanan kebencanaan, namun tidak terlibat dalam layanan ini. Sehingga untuk mengatasi hal ini Dinas Kesehatan mengambil tindakan membentuk Taruna Siaga Bencana untuk menggantikan peran BPBD. Kendala lainnya adalah Anggaran atau dana yang terbatas untuk menunjang pelaksanaan

kegiatan ini, maka beberapa hal yang dilakukan adalah membuka peluang untuk bekerjasama dengan pihak swasta guna membantu mengatasi permasalahan ini.

SIMPULAN

Penerapan program Paud Holistik Integratif di Kabupaten Sikka memiliki peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas sejak dini. BAPPERIDA, sebagai instansi yang memiliki tanggung jawab dalam peningkatan kualitas pendidikan, berperan sebagai koordinator dalam penyelenggaraan layanan ini. Melalui Tim Gugus Tugas yang dibentuk bersama beberapa instansi terkait, BAPPERIDA memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari penyusunan dasar hukum hingga sosialisasi kepada lembaga PAUD, berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebijakan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan layanan ini di tingkat Kabupaten Sikka.

Selain itu, peran BAPPERIDA sebagai penghubung antara instansi penyedia layanan juga sangat penting. Sebelum layanan ini diterapkan, BAPPERIDA melalui bidang PPM melakukan penilaian langsung terhadap lembaga-lembaga PAUD untuk memastikan kesiapan mereka dalam melaksanakan layanan tersebut. Dengan demikian, program ini dapat memastikan bahwa semua lembaga PAUD yang terlibat memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan. BAPPERIDA juga berperan dalam mengatasi kendala-kendala yang muncul, seperti keterbatasan layanan tertentu, dengan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan dinas terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Adolph, R. (2016). Jurnal pendidikan usia dini.

Afzil Ramadian, Prof. Dr. Mohamad Rizan, M.M., Usep Suhud, M.Si., P. D. (2021). Manajemen Strategi Pengembangan Aparatur Negara. August, 1–191.

Ambariani, A., & Suryana, D. (2022). Hambatan Implementasi PAUD Berbasis Holistik Integratif. Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 6(5), 5200–5208.

Angkur, M. F. M. (2022). Penerapan Layanan PAUD Holistik Integratif di Satuan PAUD. Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 6(5), 4287–4296.

Antonius Philipus, K., Goo, E. E. K., & Powo, H. L. (2016). Analisis kesenjangan antara ekspektasi dan persepsi masyarakat dalam menentukan tingkat kepuasan pelayanan publik di kecamatan alok barat kabupaten sikka. Academia.Edu, 3(2), 165–185.

Arfandy, W. (2016). Analisis Kualitas Pelayanan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serdang Begadai. Repositori.Uma.Ac.Id, 1–23.

Asmu, H., Haris, I., & Lamatenggo, N. (2018). Keefektifan koordinasi kepala sekolah dalam mengintegrasikan program dan kegiatan di SMA Negeri 1 Manangu Kabupaten Boalemo. JPs : Jurnal Riset Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, 3(1), 87–94.

Astuti, W. (2014). Hakikat Pendidikan. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 1–2.

Daerah, L., & Sikka, K. (2016). Peraturan Pengembangan. 6.

Daoed, T. S. (2017). Penerapan Standarisasi Sistem Mutu Sebagai Pengendali Produksi Pada Pt . Qton Indonesia. Majalah Ilmiah Politeknik Mandiri Bina Prestasi, 6(2), 261–270.

Haryani, M., & Qalbi, Z. (2021). Pemahaman Guru Paud Tentang Alat Permainan Edukatif (Ape) Di Tk Pertiwi 1 Kota Bengkulu. Jurnal Educhild : Pendidikan Dan Sosial, 10(1), 6.

Hasdiana, U. (2018). Analisa Integrasi Data Sinta (Science and Technology Index) Menggunakan Website Internasional Dengan Manajamen Sistem Informasi Eis (Executive Information System). Analytical Biochemistry, 11(1), 1–5.

Kemendikbud. (2015). Petunjuk Teknis penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif di Satuan PAUD 2015. In Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Kemendikbud. (2021). Panduan Implementasi Kebijakan Kampus Merdeka (MBKM). 1–66.

Makalew. (2021). Koordinasi Antara Pemerintah Dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Manado. Jurnal Governance, 1(1), 1–9.

Nasional, P. S., Muslim, U., Al, N., & Jawa, L. (2019). TRADISI LISAN JAWA SEBAGAI JATI DIRI REMAJA DI KOTA BINJAI Nila Afningsih 1), Debbi Chyntia Ovami 2),

Suhaila Husna Samosir 3).

Rosadi, A., Nur, R. A., Ridwan, D., & Apriandinata, I. (2022). Pelatihan Penulisan dan Publikasi Artikel Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Mahasiswa. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara, 3(1), 125–130.

Sahbuki Ritonga. (2023). Rekapitulasi Rata-Rata Data Hasil Wawancara Calon Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Bukhary Labuhanbatu Tahun 2023. Tarbiyah Bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains, 7(2), 1–6.

Setiantono, T. (2012). Penggunaan metode bercerita bagi anak usia dini di PAUD Smart Little Cilame Indah Bandung. Jurnal EMPOWERMENT, 1(2), 18–23.

Soedibyo. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,. Teknik Bendungan, 1, 1–7.

Thaib, B. P. L., & Golung, A. M. (2017). Peranan Ketersediaan Jurnal Ilmiah dalam Menunjang Proses Belajar bagi Mahasiswa di Perpustakaan Terpadu Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado. Acta Diurna Komunikasi, 6(4), 1–11.

Ummah, M. S. (2019). Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Sustainability (Switzerland), 11(1), 1–14.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONA. (2003). Zitteliana, 19(8), 159–170.